

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSRENBANG DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA
KAUALA BARU SUNGAI ACEH SINGKIL**

Oleh :

MUHAMMAD IQBAL

1403100179

Program Studi Ilmu Administrasi Publik



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama : MUHAMMAD IQBAL
NPM : 1403100179
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSRENBANG
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA KUALA BARU SUNGAI
ACEH SINGKIL

Medan, 13 Maret 2019

Pembimbing



SYAFRUDDIN, S.Sos, MH
Disetujui Oleh

Ketua Program Studi



NAIL KHAIRIAH, S.ip, M.Pd
Dit. Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : MUHAMMAD IQBAL
NPM : 1403100179
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Pada hari : SENIN, 19 MARET 2019
Waktu : 07.45 s/d SELESAI

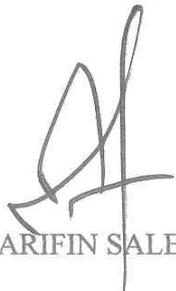
TIM PENGUJI

PENGUJI I : IDA MATINELLY, SH., MM
PENGUJI II : Drs. H. A. HIDAYAT DLT., M.Si
PENGUJI III : SYAFRUDDIN, S.Sos, MH

()
()
()

PANITIA PENGUJI

Ketua



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP



Sekretaris



Drs, ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, MUHAMMAD IQBAL, NPM 1403100179, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tan mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 13 Maret 2019
Yang Menyatakan



MUHAMMAD IQBAL
NPM. 1403100179



Cerdas & Terpercaya
 ab surat ini agar disebutkan
 tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : MUHAMMAD IQBAL
 N P M : 1403100179
 Jurusan : Ilmu administrasi negara
 Judul Skripsi : Efektifitas pelaksanaan musrenbang dalam rangka pelaksanaan
 Pembangunan infrastruktur di desa Kuala baru Kecamatan Aceh Singee

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	6.1.19	- Perbaiki masalah pengisian dan latar belakang	<i>[Signature]</i>
2.	10.1.19	- Perbaiki poin pengisian (4, 3, 3, 4)	<i>[Signature]</i>
3.	15.1.19	- Perbaiki yg diberi tanda pada bab II - ringkasan data " data sumber - Perbaiki isi data sekunder - status lokasi Panalitan, Hampung atau lain,	<i>[Signature]</i>
4.	10.2.19	- Buat tabel data sumber sama dan jenis kelamin, pendidikan dan umur, dan bab IV	<i>[Signature]</i>
5.	16.2.19	- Perbaiki bab V, dan susunlah, dan jumlah pertanyaan	<i>[Signature]</i>
6.	22.2.19	- Perbaiki penulisan daftar pustaka	<i>[Signature]</i>
7.	11.3.19	- ringkaps surat pernyataan abstrak daftar isi, kata pengantar, CV dan kelengkapan lain skripsi.	<i>[Signature]</i>
8.	13.3.19	Ata Pemb. skripsi siap uhl di ujikan dan sedang juga ujian	<i>[Signature]</i>

Medan, 13.03.2019.

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke :

[Signature]
 Dr. Arifin Saleh, S.Pd, M.Pd
[Signature]
 Abdul Wahid, S.Pd, M.Pd
[Signature]
 Syaerudin, S.Sos, M.H

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSRENBANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA KUALA BARU SUNGAI ACEH SINGKIL

MUHAMMAD IQBAL
1403100179

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kuala Baru Sungai mengenai skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Baru Sungai Aceh Singkil”, maka hasil penelitian ini adalah partisipasi masyarakat di Desa Kuala Baru Sungai dalam mengikuti pelaksanaan rapat Musrenbang di Desa Kuala Baru Sungai masih kurang aktif dan masih perlu ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dan terlibat langsung dalam proses pembuatan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan disetiap tahunnya. Hal yang menjadi kendala sehingga masih banyak masyarakat yang kurang aktif dalam mengikuti pelaksanaan musrenbang adalah kurang dilibatkannya masyarakat secara aktif dalam proses pembuatan maupun pelaksanaan program-program pembangunan di desa sehingga menyebabkan kurang terjalin hubungan kerja sama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah setempat dalam melaksanakan pembangunan di desa. Selain itu, hal mendasar lainnya mengenai permasalahan komunikasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat dengan banyaknya masyarakat yang tidak tahu tentang adanya pelaksanaan musrenbang karena tidak mendapat undangan maupun panggilan dari panitia penyelenggara musrenbang yakni pemerintah desa. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan Musrenbang ke depannya adalah dengan cara: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan program pembangunan, Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan, Menggerakkan partisipasi melalui lembaga yang dikenal oleh masyarakat, Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan program pembangunan, Mengajak masyarakat untuk bergotong royong.

Kata Kunci: Efektivitas Musrenbang, Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur desa.

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikumWarrahmatullahiWabaraktuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan serta rahmat dan hidayah kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa umat dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini.

Skripsi ini berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Baru Sungai Aceh Singkil" sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tidak terlepas dari hambatan dan rintangan yang menyertai dalam pembuatan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program strata 1 (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini penulis sertakan ucapan terima kasih yang tak terhingga yang sangat istimewa untuk kedua orangtua saya Suhaimi dan Nurhelmi yang sangat saya sayangi yang telah memberikan kasih sayang tak terhingga baik secara moril maupun materil sehingga mereka menjadi semangat saya untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Begitu juga untuk kakak dan adik saya Novi Risvi Ananda, Hidayatul Mustafid dan Awawin sebagai pelengkap dalam mendukung

saya mengerjakan skripsi ini. Disamping itu semua penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

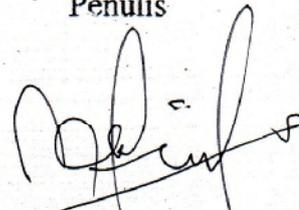
1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Rudianto, S.Sos., M.Si, selaku Wakil Rektor III di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M. Sp selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zulfahmi, M.I.Kom, selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Syafruddin, S.Sos, MH selaku Dosen Pembimbing saya dari awal hingga selesainya skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Pegawai Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mendidik dan membantu penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
8. Untuk teman-teman seperjuangan yang begitu saya banggakan, pertemanan positif, pertemanan sepanjang waktu yang selalu ada saat bahagia dan tertawa disaat saya susah yaitu, Irfan Effendi, Jefri Rinaldi, Selamat Riyadi Lingga, Aan Beto, Rizki Aditva, Deni Afrizal, Aulia Rahman Daulay, Erwin Muara Harahap, Govi Hamdani, Riski Halomoan, Yuyun Sunarika.

9. Untuk kelas B-IAN yang merupakan kelas tersolid di stambuk 2014, terima kasih untuk kekompakan dan cerita penuh warna selama hampir 4 tahun ditunggu kesuksesannya.
10. Untuk para responden yaitu karyawan yang berada di Kampung Kuala Baru Sungai.
11. Untuk keluarga besar dan teman-teman terdekat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, teman teman kost rasa keluarga, terimakasih atas doa dan semangatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh sempurna dari yang diharapkan. Oleh karenanya, kritik dan saran yang bersifat membangun dari segenap pembaca akan penulis terima dengan sepenuh hati. Dengan bantuan dan dukungan yang telah penulis dapatkan, akhirnya dengan menyerahkan diri dan senantiasa memohon petunjuk dan perlindungan dari Allah SWT semoga amalan dan perbuatan baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula. Amin ya Rabbal'alamin.

Medan, Maret 2019

Penulis



Muhammad Iqbal

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II URAIAN TEORITIS	
A. Efektivitas.....	8
1. Pengertian Efektivitas.....	8
2. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas	9
3. Kriteria Efektivitas	11
B. Konsep Pelaksanaan.....	13
1. Pengertian Pelaksanaan	13
2. Faktor Pelaksanaan.....	14
C. Tinjauan Tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).....	15
1. Pengertian Musrenbang	15
2. Tujuan Musrenbang.....	18
D. Defenisi Pemerintah Desa	19
E. Konsep Pembangunan	21
1. Konsep Pembangunan	21
2. Perencanaan Pembangunan.....	22
3. Pengertian Pembangunan Desa.....	24
4. Ciri - Ciri dan Prinsip Pembangunan Desa.....	26
5. Perencanaan Pembangunan Desa.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	29
B. Kerangka Konsep	30
C. Definisi Konsep	31
D. Kategorisasi	33
E. Narasumber	33
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Teknik Analisis Data	35
H. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
I. Deskripsi dan Lokasi Penelitian	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data	50
B. Pembahasan	62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Kerangka Konsep.....	31
Gambar 3.2. Peta Administrasi Kampung Kuala Baru Sungai.....	38
Gambar 3.3. Struktur Organisasi	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Batas Wilayah Kuala Baru Sungai.....	38
Tabel 4.1	Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin.....	51
Tabel 4.2	Deskripsi Narasumber Menurut Umur.....	51
Tabel 4.3	Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan	52
Tabel 4.4	Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Musrenbang merupakan media utama konsultasi publik yang digunakan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Musrenbang tahunan merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk perencanaan pembangunan tahunan, yang dilakukan secara berjenjang melalui mekanisme “*bottom-up planning*”, dimulai dari Musrenbang desa, Musrenbang kecamatan, dan Musrenbang kabupaten/kota, dan untuk jenjang berikutnya hasil Musrenbang kabupaten/kota juga digunakan sebagai masukan untuk Musrenbang provinsi, dan Musrenbang nasional. Proses Musrenbang pada dasarnya mendata aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan melalui pembahasan ditingkat desa, dilanjutkan ditingkat kecamatan, dikumpulkan berdasarkan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah, dan selanjutnya diolah dan dilakukan prioritas program/kegiatan ditingkat kabupaten/kota oleh Bappeda bersama para pemangku kepentingan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan kewenangan daerah (Lestercong 2 Wiajaya:2013).

Infrastruktur sebenarnya merupakan kebutuhan vital untuk menunjang kegiatan ekonomi. Kemajuan ekonomi suatu desa biasanya berkorelasi dengan pembangunan infrastruktur di desa itu. desa yang infrastrukturnya baik biasanya makin makmur (Dewanto, 2004).

Infrastruktur di Desa Kuala Baru Sungai masih sangat tertinggal dibandingkan sejumlah desa tetangga. Ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur itu tak hanya terlihat dari tertundanya proyek-proyek besar, tapi juga dapat dirasakan langsung dari kondisi jalan yang rusak, dan buruknya kondisi prasarana umum.

Jalan di Desa Kuala Baru Sungai tidak pernah berada dalam keadaan baik, rata-rata separuhnya berada dalam kondisi rusak baik ringan maupun berat oleh karena biaya pemeliharaan yang jauh dari mencukupi, maka terjadi *backlog maintenance* sehingga pada tahun 2017 panjang jalan desa yang rusak secara cepat menjadi semakin parah sedangkan panjang jalan desa yang rusak diperkirakan sudah mencapai +5 km. Selain tidak memadainya dana desa, beberapa faktor lain menjadi penyebab rendahnya kualitas konstruksi jalan, bencana alam, serta belum tumbuhnya kesadaran memelihara aset publik yang berbentuk jalan

Jenis infrastruktur pedesaan yang menjadi dasar usulan kegiatan, infrastruktur tersebut berupa jalan poros desa, jalan desa/lingkungan/setapak, jembatan gantung, pasar tradisional, balai desa, posyandu. dan lain lain (Kimpraswil, 2001). Dari keterangan tersebut infrastruktur pedesaan dapat dikategorikan dalam tiga kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan dalam pembangunan infrastruktur pedesaan yaitu: jalan desa, air bersih, listrik.

Program infrastruktur desa tertinggal yang direncanakan meliputi, pembangunan jalan, jembatan, irigasi, air bersih, listrik serta kebutuhan masyarakatlainnya. Sedangkan sasaran utama yang hendak dicapai yakni

membuka isolasi desa guna kelancaran kegiatan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dana Desa (DD) tentunya berhubungan dengan Administrasi Pembangunan yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana disemua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan. Pembangunan merupakan suatu proses, pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahapan-tahapan yang disatu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan “bagian” dari suatu yang bersifat tanpa akhir (*never ending*). Banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan pentahapan tersebut, seperti berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan. Administrasi Negara, Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.

Pelaksanaan musrenbang di Desa Kuala Baru Sungai dilaksanakan dengan berbagai tahapan dan proses mulai dari panggilan gagasan dari tingkat dusun masing-masing yang disepakati secara bersama-sama antara kepala desa, badan permusyawaratan desa, tokoh pemuda, tokoh agama, nelayan, petani, dan pendidik yang menjadi kebutuhan mendesak sampai dibawa dalam musrenbang di tingkat desa untuk dijadikan prioritas pembangunan.

Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, sedang dan jangka pendek. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumber daya yang tersedia, sehingga dalam

proses pelaksanaan pembangunan bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pembangunan di Desa Kuala Baru Sungai menjadi tanggungjawab kepala Desa Kuala Baru Sungai. Kepala Desa Kuala Baru Sungai mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembangunan, Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa Kuala Baru Sungai dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di Desa Kuala Baru Sungai.

Masyarakat di Desa Kuala Baru Sungai berharap dapat lepas dari masalah-masalah itu karena itu masalah-masalah warga masyarakat dalam kebutuhannya untuk meningkatkan taraf hidupnya antara lain kebutuhan pokok seperti makanan yang cukup dan sehat, rumah yang sehat, pakaian yang memadai, kebutuhan pengetahuan, keterampilan, penghasilan yang cukup, lingkungan yang apik dan sehat dan lain-lain. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pengembangan organisasi pemerintah yang telah diprogramkan perlu didukung oleh aparatur pelaksana yang mampu, dan untuk itu perlu dijalin hubungan serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah di bawahnya sampai pada unit pemerintahan yang terendah yaitu pemerintah Desa. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tertib hukum dan menciptakan kepastian hukum bagi jalannya kehidupan organisasi pemerintahan di Indonesia, tetapi juga yang penting adalah mensukseskan pembangunan di segala bidang di Seluruh Indonesia guna mencapai cita-cita nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yaitu

masyarakat adil dan makmur baik materil maupun spritual bagi Seluruh rakyat Indonesia. Maka perlu memperkuat kedudukan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan organisasi dan makin mampu menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang makin meluas dan efektif. Sehubungan dengan latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian di Desa Kuala Baru Sungai Aceh Singkil Dengan mengambil judul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSRENBANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA KUALA BARU SUNGAI ACEH SINGKIL.”**

B. Rumusan masalah

Sugiyono (2007: 35) mengatakan bahwa rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian, terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah peneliti harus didasarkan pada masalah .

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas pelaksanaan Musrenbang dalam rangka pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Kuala Baru Sungai Aceh Singkil?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan suatu hal yang akan dicapai dalam suatu kegiatan, dan setiap penelitian haruslah memiliki arah dan tujuan yang jelas

.Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Baru Sungai Aceh Singkil.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran yang positif terhadap pemecahan masalah praktis yang terkait dengan judul penelitian.
- b. Secara akademis, diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan social dan juga sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi strata-1 jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera utara.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab yang lainnya yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Terdiri dari : Efektifitas Pengertian Efektivitas, faktor yang mempengaruhi efektivitas, kriteria efektivitas, konsep pelaksanaan, faktor pelaksanaan, pengertian musrenbang, tujuan musrenbang, pemerintah desa, konsep pembangunan, perencanaan pembangunan, pengertian pembangunan desa, ciri-ciri dan prinsip pembangunan desa, perencanaan pembangunan desa.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini menguraikan tentang Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan data, Teknis Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narasumber-narasumber .

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif apabila sudah tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Efektivitas menurut Limbong (2017: 10) adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa mutu tertentu tepat pada waktunya.

Raihani (2015: 8) mendefinisikan efektivitas adalah kondisi atau keadaan yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dalam suatu pekerjaan sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas dijadikan sebagai ukuran berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Menurut Lubis (2018:18) efektivitas adalah kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan akan suatu pekerjaan atau program, dengan kemampuan memilih tujuan melalui pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam

jumlah tertentu agar tercapainya tujuan organisasi yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya.

Berbagai pendapat telah dikemukakan para ahli di atas, dan kesemuanya menunjukkan bahwa efektivitas merupakan ukuran keberhasilan akan suatu pekerjaan atau program. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas penulis sependapat dengan pendapat Raihani (2015: 8) yang mengatakan efektivitas adalah kondisi atau keadaan yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dalam suatu pekerjaan sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas dijadikan sebagai ukuran berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Dalam konsep efektivitas terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun menurut Sutrisno (2011: 125) terdapat empat kelompok variable yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi yaitu: (a) karakteristik organisasi, termasuk struktur dan organisasi; (b) karakteristik lingkungan internal dan lingkungan eksternal; (c) karakteristik karyawan; (d) kebijakan praktik manajemen.

Makmur (2011: 7) mengungkapkan indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut : (a) ketepatan waktu. Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya; (b) ketepatan perhitungan biaya. Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam

artitidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan-satuan biaya merupakan bagian daripada efektivitas; (c) ketepatan dalam pengukuran. Dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran daripada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi; (d) ketepatan dalam menentukan pilihan. Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur; (e) ketepatan berpikir. Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektivan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal; (f) ketepatan dalam melakukan perintah. Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti dan dipahami maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi; (g) ketepatan dalam menentukan tujuan. Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang; (h) ketepatan sasaran. Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula

sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Handayani (2017: 17) efektivitas dapat berjalan efektif apabila kemampuan untuk memilih tujuan tepat dan terarah sehingga dapat berjalan relatif singkat. Suatu pelaksanaan kerja tersebut di proses mendekati kepada unsur-unsur dari apa yang dimaksudkan dalam definisi efektivitas itu sendiri.

3. Kriteria Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung dari siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil usaha atau hasil kerja dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Handayani (2017: 13) menjelaskan kriteria efektivitas dapat diukur dari sejauh mana organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber daya yang ada.

Kriteria mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak juga telah dijelaskan oleh Siagian (2001: 24) yaitu; (a) kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran

yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai; (b) kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi; (c) proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapaidan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional; (d) perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan; (e) penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja; (f) tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi; (g) pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya; (h) sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Rihardini (2012: 15) mengatakan mengenai ukuran efektivitas yaitu; (a) pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin,

diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Sebuah program dikatakan efektif jika telah teapat dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (a) kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit; (b) adaptasi adalah kemampuan organisasi atau program untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah apakah pengisian tenaga kerja sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan dari pelaksana program itu sendiri. Peran aktif dari pelaksana program juga termasuk di dalam adaptasi program, agar tujuan dari sebuah program dapat tercapai secara maksimal. Serta adanya tanggapan program dari lingkungan luar seperti keinginan sasaran, dan kualitas dari program itu sendiri. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya; (c) integrasi menyangkut proses sosialisasi. Sosialisasi di sini merupakan sosialisasi secara langsung dengan bertatap muka atau dengan menggunakan perantara misalnya baleho, atau dengan menggunakan pamflet. Proses sosialisasi ini mempunyai tujuan agar program yang berjalan dapat diketahui oleh masyarakat serta memberikan informasi kepada masyarakat tujuan adanya program tersebut.

B. Konsep Pelaksanaan

1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky dalam Nurdin (2002:70) mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Pelaksanaan menurut Syukur (1987:40) merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

2. Faktor Pelaksanaan

Menurut Nurdin (2002:71) Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut: (a) komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi

informasi yang disampaikan; (b) *resources* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan; (c) disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program; (d) struktur birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

C. Tinjauan Tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

1. Pengertian Musrenbang

Musrenbang adalah forum musyawarah perencanaan tahunan tingkat Kelurahan untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil Rembug Warga yang telah dilaksanakan, serta membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan yang akan disampaikan di Musrenbang. Musrenbang merupakan forum dialogis antara Pemerintah dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dibutuhkan dan merupakan prioritas untuk mengatasi permasalahan di wilayah.

Menurut Albert Waterston dalam Tjokroamidjojo (1990 : 12) Perencanaan pembangunan adalah melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai

alternatif dari kegiatan untuk mencapai masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaan tidak menyimpang dari tujuan.

Secara umum, unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan terdiri dari enam unsur, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan yang sering pula disebut tujuan, arah, dan prioritas pembangunan. Pada unsur ini perlu ditetapkan tujuan-tujuan rencana;
- 2) Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel variabel dalam pembangunan dan implikasinya;
- 3) Adanya perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan;
- 4) Adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi, seperti kebijaksanaan fiskal, moneter, anggaran, sektoral, dan pembangunan daerah
- 5) Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral, seperti pertanian, industri, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain; dan Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Ciri suatu perencanaan pembangunan yang bersifat usaha pencapaian tujuan-tujuan pembangunan biasanya berkait pula dengan peranan pemerintah sebagai pendorong pembangunan Ciri-ciri perencanaan pembangunan menurut Tjokroamidjojo (1990: 49) diuraikan sebagai berikut:

Suatu perencanaan pembangunan adalah usaha yang diceminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap (*steadysocial economy growth*). Hal ini dicerminkan oleh dalam usahapeningkatan produksi nasional, berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang positif.

- 1) Usaha yang dicerminkan dalam rencana meningkatkan pendapatan perkapita. Laju pertumbuhan ekonomi yang positif, yaitu setelah dikurangi dengan laju pertumbuhan penduduk menunjukkan pula kenaikan pendapatan per kapita.
- 2) Usaha mengadakan perubahan struktur ekonomi yang mendorong peningkatan struktur ekonomi agraris menuju struktur industri.
- 3) Adanya perluasan kesempatan kerja.
- 4) Adanya pemerataan pembangunan yang meliputi pemerataan pendapatan dan pembangunan antara daerah.
- 5) Adanya usaha pembinaan lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan pembangunan.
- 6) Upaya membangun secara bertahap dengan berdasar kemampuan sendiri/nasional.

Usaha terus menerus menjaga stabilitas ekonomi menurut Koiruddin (2005:151-152) ada beberapa hal yang perlu diketahui sebelum memulai perencanaan pembangunan, yakni sebagai berikut:

- 1) Permasalahan yang dihadapi sangat terkait dengan faktor ketersediaan sumber daya yang ada;
- 2) Tujuan serta sasaran rencana yang ingin dicapai oleh pelaksana;
- 3) Kebijakan dan cara mencapai tujuan maupun sasaran berdasarkan alternatif yang di pandang paling baik;
- 4) Penjabaran dalam program-program atau kegiatan yang kongkrit;

Jangka waktu pencapaian, yang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (a) adanya koordinasi antara berbagai pihak,
- (b) adanya konsistensi dengan variabel sosial ekonomi,
- (c) adanya penetapan skala.

Prioritas.dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Pembangunan dalam bidang apapun, pada hakikatnya menghendaki terjadinya keseimbangan yang tercermin dalam konsep pemerataan. Oleh sebab itu Musrenbang dapat dijadikan wadah yang tepat untuk mengembangkan usaha perencanaan pembangunan, membangun sinergi antar seluruh stakeholder dalam memecahkan masalah dan mencari alternatif-alternatif pembangunan yang lebih baik.

2. Tujuan Musrenbang

Menurut Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri. Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007 Penyelenggaraan Musrenbang Desa Bertujuan untuk:

- 1) Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat Kelurahan/desa yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan
- 2) Membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Kelurahan/desa.
- 3) Melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

D. Defenisi Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Urusan pemerintahan yang mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar desa. Urusan kemasyarakatan ialah pembedayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan,

pendidikan, dan adat-istiadat. Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa ini disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana diatas disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa Sekretaris Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa. Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dan usia perangkat desa tersebut paling rendah 25 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. Mengenai Perangkat Desa Lainnya ini diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan desa.

Desa memiliki hak otonomi tetapi tetap dalam ikatan pemerintah Republik Indonesia. Hak otonomi maksudnya berhak menyelenggarakan rumah tangganya

menurut keputusan sendiri, berhak mengatur rumah tangganya sendiri, asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah di desanya dan berkewajiban melaksanakan peraturan pemerintah Desa. Sedangkan Kelurahan tidak memiliki hak otonomi dan tidak berhak menyelenggarakan rumahtangganya menurut keputusan sendiri. Hanya menyelenggarakan pemerintahan menurut peraturan pemerintah di atasnya. Inilah bedanya dengan Desa seperti yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Di Desa terdapat masalah yang dihadapi masyarakat yang meliputi: masalah kesehatan, masalah pekerjaan dan pendapatan, pendidikan, pertanian, lingkungan hidup dan lain sebagainya.

E. Konsep Pembangunan

1. Konsep Pembangunan

Istilah pembangunan juga menunjukkan hasil proses pembangunan itu sendiri. Secara etimologi, pembangunan berasal dari kata bangun, di awalan “pe “ dan akhiran “ an “, guna menunjukkan perihal orang membangun, atau perihal bagaimana pekerjaan membangun itu dilaksanakan. Kata bangun setidaknya mengandung tiga artibangun dalam arti sadar atau siuman, kedua, berarti bentuk, ketiga, bangun berarti kata kerja, membangun berarti mendirikan. Dilihat dari segi ini, konsep, pembangunan meliputi ketiga arti tersebut. Konsep itu menunjukkan pembangunan sebagai : 1) Masukan, kesadaran kondisi mutlak bagi berhasilnya perjuangan bangsa. 2) Proses, yaitu membangun atau mendirikan berbagai kebutuhan berdasarkan nasional. 3) Keluaran, yaitu berbagai bentuk bangun sebagai hasil perjuangan, baik fisik maupun non fisik

(Ndraha, 1987:1-2). Bintoro (1990:59) menyebutkan bahwa pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan yang dilakukan oleh suatu bangsa secara sadar, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Berdasarkan berbagai definisi yang di kemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, kebersamaan, kesempatan, kemandirian dan saling ketergantungan masyarakat, yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

2. Perencanaan Pembangunan

Pengertian perencanaan pembangunan dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya yaitu: perencanaan dan pembangunan. Menurut Hadiwijoyo (2012 : 7) bahwa teori perencanaan yang ideal adalah yang tidak hanya mampu mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat tetapi juga mampu memadukan berbagai kepentingan yang terlibat.

Perencanaan menurut Hasibuan (1993: 95) adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pengertian pembangunan menurut Siagian (1991:32) adalah suatu usulan atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Perencanaan menurut Lembaga Administrasi Negara (dalam Riyadi dan Bratakusumah, 2004: 4) bahwa perencanaan merupakan memilih prioritas dan cara atau alternatif untuk mencapai tujuan, pengalokasian

sumber daya, bertujuan mencapai tujuan, berhubungan dengan masa depan, serta kegiatan yang terus menerus.

Pendapat ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Conyers (1991: 3) *Planning* atau perencanaan adalah sebagai: “suatu proses yang terus menerus yang melibatkan keputusan-keputusan, alternatif-alternatif atau pilihan, mengenai cara-cara alternatif penggunaan sumber-sumber daya, dengan tujuan menghasilkan sasaran-sasaran spesifik untuk waktu yang akan datang”. Lebih lanjut Riyadi dan Bratakusumah (2004: 6) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, maka perencanaan pembangunan merupakan pedoman/acuan/dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat melaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan), serta perlu disusun dalam suatu perencanaan strategis dalam arti tidak terlalu mengatur, penting, mendesak dan mampu menyentuh kehidupan masyarakat luas, sekaligus mampu mengantisipasi tuntutan perubahan baik internal maupun eksternal, serta disusun berdasarkan fakta riil di lapangan. Untuk mendapatkan hasil perencanaan pembangunan daerah yang baik, tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena masyarakat sebagai salah satu unsur dalam pembangunan.

Tentunya mereka dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang ada di wilayahnya, disamping itu dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada masyarakatnya. Sehingga mereka dapat merasa ikut bertanggung jawab dan merasa memiliki program-program pembangunan yang jelas akan sangat

menguntungkan bagi pelaksanaannya. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan adalah sebagai alat merencanakan untuk masa yang akan datang, untuk melakukan perubahan yang lebih baik dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan tersebut.

3. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di suatu Negara. Siagian, (1991:21) mendefinisikan pembangunan adalah suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintahan dalam usaha pembinaan bangsa.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam konsep pembangunan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yakni: harus ada usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahnya, dilaksanakan secara sadar, terarah dan berkesinambungan agar tujuan dari pembangunan itu dapat tercapai. Dari beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan tersebut, bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam suasana kehidupan yang penuh harmonis.

Dalam pembangunan, peran serta seluruh lapisan masyarakat selaku pelaku pembangunan dan pemerintah selaku pengayom, Pembina dan pengarah sangat diperlukan. Antara masyarakat dan pemerintah harus berjalan seiring, saling mengisi, melengkapi dalam satu kesatuan gerak pembangunan guna

mencapai tujuan yang diharapkan. Pembangunan harus menyangkut semua pihak yaitu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, pembangunan yang pertama harus di bina dan dikembangkan adalah pembangunan desa. Berkenaan dengan pembangunan desa, Sudirwo, (1985:63) mendefinisikan pembangunan desa sebagai berikut: Pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan spiritual berdasarkan Pancasila yang berlangsung di desa. Soewignjo (1985:24) mengemukakan pembangunan desa yaitu perencanaan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Sementara Ndraha (1985:71) mengemukakan bahwa pembangunan desa merupakan setiap pembangunan yang didalam prosesnya masyarakat harus berpartisipasi aktif. Menurut Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa: Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Berdasarkan definisi di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa keikutsertaan masyarakat dalam proses penentuan pembangunan di desanya yang dapat mendorong mereka untuk menyumbang pikir, kegiatan dan lainnya agar tercapai tujuan masyarakat dengan cara mendiskusikan, menentukan keinginan, merencanakan dan mengerjakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berbasis partisipasi masyarakat. Melalui pembangunan desa diupayakan agar masyarakat memiliki

keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan.

4. Ciri – Ciri dan Prinsip Pembangunan Desa

Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan.

Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas pembangunan desa itu sendiri, seperti yang dikemukakan dari Kansil, (1983:251) tentang ciri-ciri dan prinsip dalam pembangunan desa Komprehensif multi sektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan sistem pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintah dan masyarakat, Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan esensial kegiatan masyarakat, Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan pedesaan termasuk desa-desa di wilayah kelurahan. ,Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional dan regional dan daerah pedesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah pengembangan wilayah sedang dan kecil., Menggerakan partisipasi, prakaras dan swadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu. Jadi di dalam

merealisasikan pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek, jangan dari satu aspek, agar pembangunan desa itu dapat sesuai dengan apa yang diinginkan.

Kegiatan–kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat dilanjutkan dan dikembangkan ke seluruh pelosok daerah, untuk seluruh lapisan masyarakat. pembangunan itu pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Olehkarena itu pelibatan masyarakat seharusnya diajak untuk menentukan visi pembangunan masa depan yang akan diwujudkan.

Masa depan merupakan impian tentang keadaan masa depan yang lebih baik dan lebih mudah dalam arti tercapainya tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Jadi, pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan artinya harus melibatkan semua komponen yaitu dari pihak masyarakat dan pemerintah, dan harus langsung secara terus menerus demi tercapainya kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang

5. Perencanaan Pembangunan Desa

Menurut Undang–Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitik beratkan pada peranserta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Konsep ini dilandasi oleh nilai-nilai dan semangat gotong royong yang telah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia.

Gotong royong bertumpu pada keyakinan bahwa setiap warga mempunyai hak untuk memutuskan dan merencanakan apa yang terbaik bagi diri dan lingkungan serta cara terbaik dalam upaya mewujudkannya. Menurut Sumpeno

(2004:32) bahwa secara garis besar perencanaan desa mengandung pengertian sebagai berikut :

- a. Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari indentifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan.
- b. Perencanaan pembangunan lingkungan; semua program peningkatan kesejahteraan, ketentraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat RT/RW, dusun dan desa
- c. Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi, dan sumber daya masyarakat setempat
- d. Perencanaan desa menjadi wujud nyata peran serta masyarakat dalam membangun masa depan
- d. Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan Untuk itu, sebelum melakukan musrenbang ada baiknya penyusunan materi muatan musrenbang maupun dalam pelaksanaan musrenbang terlebih dahulu meliha semua pemangku kepentingan yang sesuai, termasuk pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil yang telah mengimplementasikan praktek-praktek Musrenbang yang baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan analisis pengolahan data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan melalui cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dengan alasan untuk mengetahui fakta yang menjadi variable telah berjalan dengan baik atau tidak.

Berdasarkan penjelasan Moleong (2012: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan jenis penelitian deskriptif yang juga dikemukakan oleh Moleong (2012: 11) ialah dimana data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan- kutipan yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan dan dokumen resmi lainnya.

Pemilihan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif tersebut karena peneliti ingin melihat dan menggambarkan fenomena yang terjadi pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

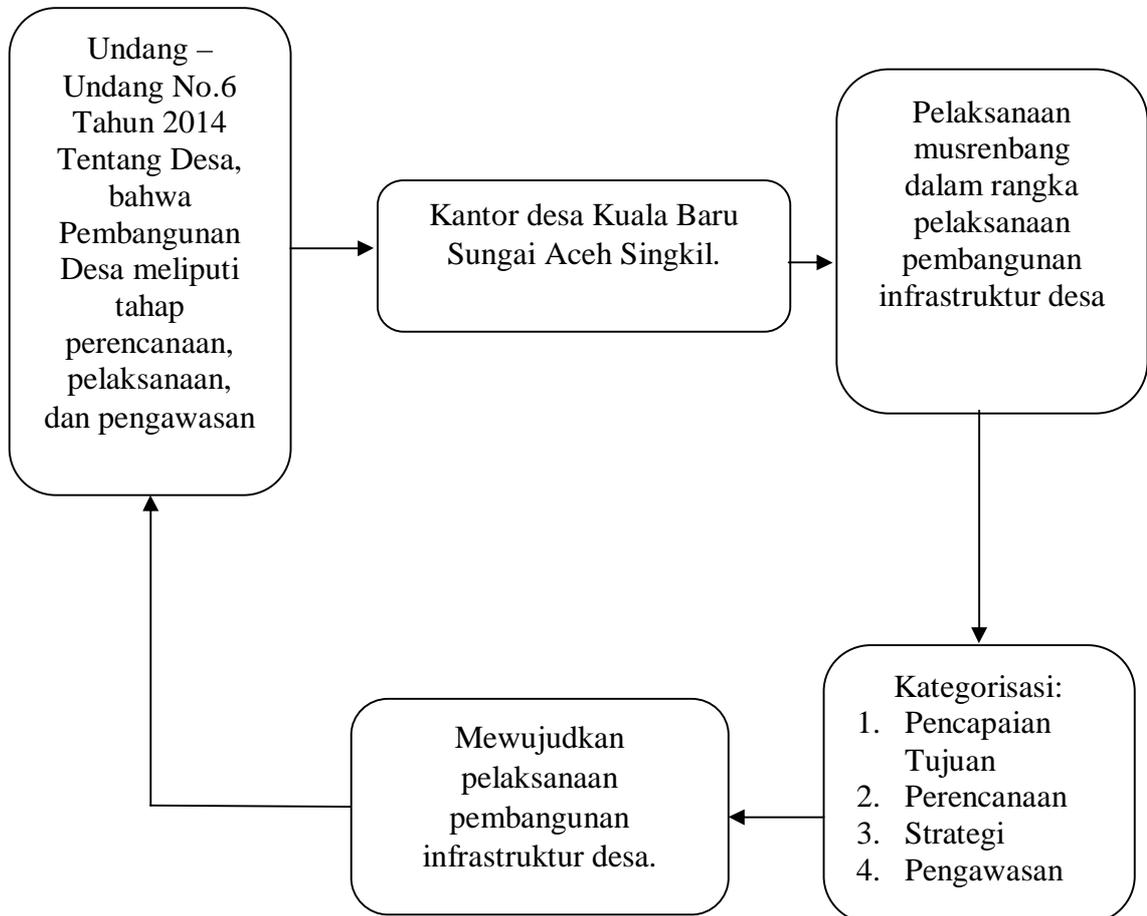
Dengan demikian peneliti berharap bisa mengumpulkan dan menganalisis data yang didapat secara baik dan benar, untuk menggambarkan bagaimana efektivitas pelaksanaan musrenbang dalam rangka pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Kuala Baru Sungai Aceh Singkil.

B. Kerangka Konsep

Konsep merupakan istilah khusus yang digunakan para ahli dalam upaya menggambarkan secara cermat fenomena sosial yang akan diteliti, untuk menghindari salah pengertian atas makna konsep-konsep yang akan dijadikan objek penelitian. Dengan kata lain, penulis berupaya membawa para pembaca hasil penelitian ini untuk memaknai konsep sesuai dengan yang diinginkan dan dimaksudkan oleh penulis. Jadi, definisi konsep oleh Siagian (2011: 138) ialah pengertian yang terbatas dari suatu konsep yang dianut dalam suatu penelitian

Konsep yang akan dibahas dalam penelitian efektivitas pelaksanaan musrenbang dalam rangka pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Kuala baru sungai Aceh Singkil. Agar konsep tersebut dapat dijelaskan, maka kerangka konsep dirangkum dan digambarkan dalam model teoritis sebagai berikut:

Gambar 3.1

Kerangka Konsep**C. Definisi Konsep**

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini antara lain:

1. Efektivitas adalah kondisi atau keadaan yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dalam suatu pekerjaan sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas dijadikan sebagai ukuran berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

2. Pelaksanaan adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.
3. Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Musrenbang diatur dalam Undang-Undang no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diatur oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan diatur oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk tingkat nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),
4. Pemerintah Desa
Menurut Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa: Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

D. Kategorisasi

Kategorisasi bertujuan untuk menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisa dari variable tersebut. Adapun kategorisasi dari penelitian ini adalah:

1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah hasil yang diharapkan dan upaya pencapaian hasil yang ingin diperoleh dari dilakukanya pelaksanaan Musrenbang dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kuala Baru Sungai Aceh Singkil.

2) Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan adalah memilih dan menghubungkan fakta serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang di inginkan.

3) Strategi

Strategi adalah tata cara pelaksanaan musrenbang dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kuala Baru Sungai Aceh Singkil.

4) Pengawasan

Pengawasan adalah sebagai evaluasi penilaian pelaksanaan musrenbang di Desa Kuala Baru Sungai Aceh Singkil.

E. Narasumber

Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh dari informan atau narasumber adalah orang yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan

musrenbang dalam rangka pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Kuala Baru Sungai Aceh Singkil diantaranya :

1. Nara Sumber 1

Nama : Suhaimi
Usia : 57 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala Desa Kuala Baru Sungai
Pendidikan : SMA

2. Narasumber 2

Nama : Raflizar Syahputra, S.Pd
Usia : 33 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Sekretaris Desa Kuala Baru Sungai
Pendidikan : S1

3. Narasumber 3

Nama : Qussyairi, S, EI
Usia : 31 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Bendahara Desa Kuala Baru Sungai
Pendidikan : S1

4. Nara Sumber 4

Syaiful : 51 tahun
Abdullah : 56 tahun
Rahmita : 40 tahun

Asmawati	: 45 tahun
H. Jufri	: 50 Tahun
Asse Bandu	: 45 Tahun

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung di lapangan atau tempat penelitian melalui wawancara. Suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang diambil dari sumber data secara langsung melalui pertanyaan atau dialog dengan satu orang atau lebih, terkait tentang Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Baru Sungai Aceh Singkil.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Sebagai pendukung data primer sesuai dengan judul penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber daya yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan data serta

menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Penggunaan metode tersebut dengan mempertimbangkan bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan efektivitas pelaksanaan musrenbang dalam rangka pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Kuala Baru Sungai Aceh Singkil. Dan mengambil kesimpulan berdasarkan jawaban yang diberikan narasumber. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman :

a) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b) Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c) Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan stemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis, dan bila didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori.

H. Lokasi dan Waktu Penelitian

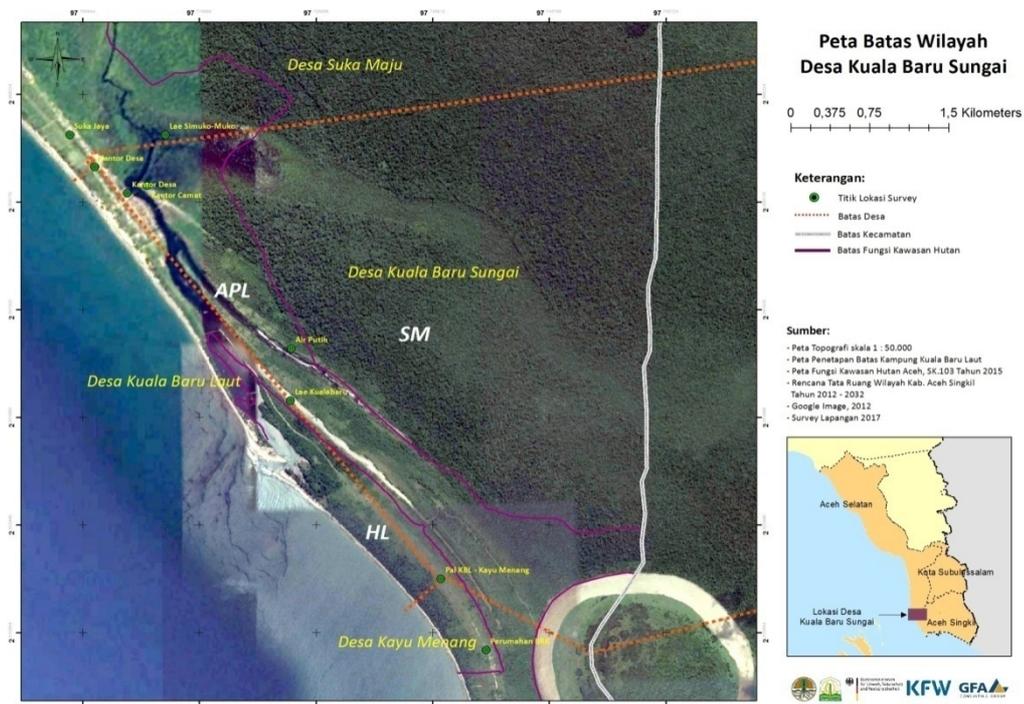
Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana kita melakukan penelitian dan mengumpulkan data yang kita perlukan dalam melakukan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada bulan februari 2018. Adapun yang menjadi tempat penelitian dalam penelitian ini adalah di Desa Kuala Baru Sungai Aceh Singkil.

I. Deskripsi dan Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kampung

Kampung Kuala Baru Sungai berada diwilayah Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Konon katanya, Sebelum menjadi Kampung Kuala Baru Sungai, dulunya diceritakan ada para nelayan yang terdampar dipantai Kuala Baru yang tidak tau jalan pulang. Sehingga para nelayan tersebut membuat gubuk - gubuk sebagai tempat tinggal. Setelah lama menetap, akhirnya mereka membentuk sebuah pemerintahan yang disebut pemukiman. Penduduk Kuala Baru tempo dulu masih sangat sedikit dengan pendidikan tidak ada dan mempunyai mata pencaharian hanya sebagai nelayan. Hingga sekarang ini, mata pencaharian masyarakat Kuala Baru Sungai pada umumnya sebagai nelayan.

Secara geografi Kampung Kuala Baru Sungai dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Hasil Pemetaan BCCPGLE-KFW

Gambar 3.2 Peta Administrasi Kampung Kuala Baru Sungai

Adapun batas-batas wilayah Kampung Kuala Baru Sungai adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Batas Wilayah Kampung Kuala Baru Sungai

BATAS WILAYAH	DESA	KECAMATAN
Sebelah Utara	Hutan Singkil	Singkil
Sebelah Selatan	Desa Kayu Menang	Kuala Baru
Sebelah Timur	Hutan Rimba	Kota Baharu
Sebelah Barat	Desa Suka Jaya	Kuala Baru

Sumber: Profil Kampung Kuala Baru Sungai Tahun 2018

Secara Administratif, wilayah Kampung Kuala Baru Sungai terdiri dari 4 Dusun yaitu: Dusun Cempaka, Dusun Anggrek, Dusun Melati dan Dusun

Seberang. Kampung Kuala Baru Sungai berdasarkan ketinggian wilayah diklasifikasikan kepada dataran rendah (0-100 M dpl).

b. Visi dan Misi Kampung Kuala Baru Sungai

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Kampung harus selaras dengan RPJM Kampung, maka RKP Kampung Kuala Baru Sungai Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Kampung Kuala Baru Sungai yang tertuang dalam RPJM Kampung Kuala Baru Sungai, sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Kampung Kuala Baru Sungai, adalah Terwujudnya Masyarakat yang Makmur dan Sejahtera serta Mandiri dalam Memanfaatkan Sumber Daya Alam Lokal.

c. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kampung

Program dan kegiatan Kampung Kuala Baru Sungai Tahun Anggaran 2018, antara lain:

1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung:

- a) Kegiatan pembayaran siltap dan tunjangan;
- b) Kegiatan operasional kantor Kepala Kampung;
- c) Kegiatan operasional BPK;
- d) Kegiatan pengelolaan informasi;
- e) Kegiatan pendataan Kampung;
- f) Kegiatan penyusunan dokumen RKPkam dan APBkam; dan
- g) Kegiatan Penyelenggaraan musyawarah Kampung;

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung:

- a) Kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga matahari

- b) Kegiatan Pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan;
- c) Kegiatan pengadaan tanah kas Kampung;
- d) Kegiatan pembangunan website Kampung;
- e) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan;
- f) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
- g) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana taman bacaan masyarakat
- h) Kegiatan pembangunan jalan pemukiman;
- i) Kegiatan pembangunan sarana air bersih; dan
- j) Kegiatan pengadaan kendaraan pengangkut sampah.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a) Kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga;
- b) Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/ PKK;
- c) Kegiatan pembinaan kerukunan ummat beragama;
- d) Kegiatan pembinaan lembaga adat;
- e) Kegiatan peringatan hari besar keagamaan;
- f) Kegiatan peringatan hari besar nasional; dan
- g) Kegiatan pembinaan lembaga/ organisasi masyarakat Kampung.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

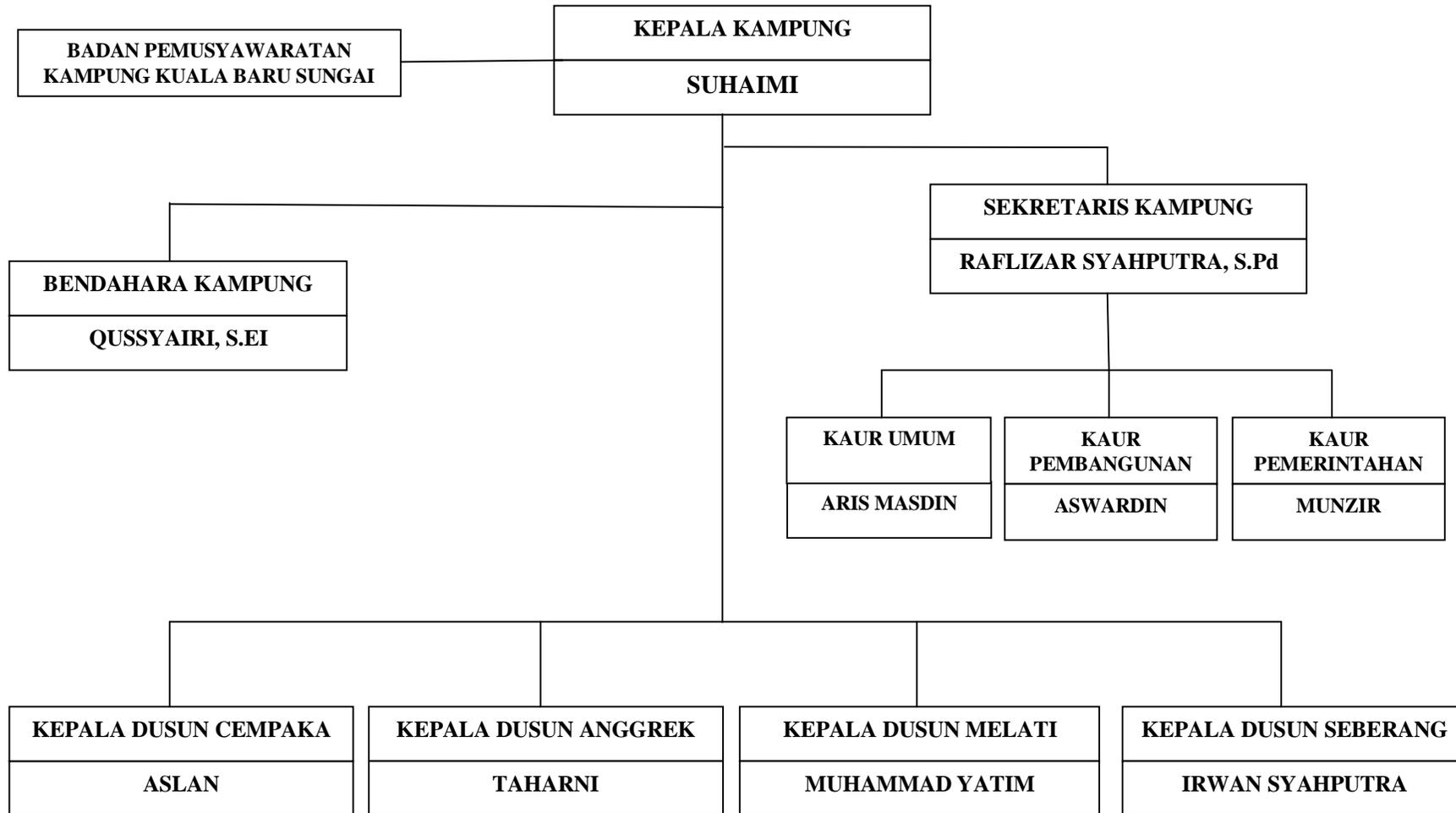
- a) Kegiatan bantuan insentif kader kesehatan masyarakat;
- b) Kegiatan pemantauan dan penyediaan sehat bagi balita (PMT);
- c) Kegiatan bantuan insentif guru TPA;
- d) Kegiatan pengembangan BUMkam;
- e) Kegiatan pembentukan dan penguatan posyantekdes;

- f) Kegiatan pelatihan swakelola dan padat karya tunai;
- g) Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas BPK;
- h) Kegiatan pelatihan kapasitas manajemen pengelolaan PKK;
- i) Kegiatan pelatihan penyuluhan narkoba dan upaya pencegahannya;
- j) Kegiatan Bimtek petugas Kampung dalam program PTSL;
- k) Kegiatan pelatihan bisnis plan atau kelayakan usaha BUMkam; dan
- l) Kegiatan pelatihan peningkatan/ upgrade Siskeudes.

5. Bidang Penyediaan Dana Tak Terduga

- a) Kegiatan penanggulangan bencana alam.

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN
KAMPUNG KUALA BARU SUNGAI
TAHUN 2015 -2021**



Sumber: Kampung Kuala Baru Sungai

1. Tugas Fungsi Pemerintahan Kampong Kuala Baru Sungai

a. Tupoksi Kepala Kampong

Tugas dan fungsi Kepala Kampong dan Perangkat Kampong lainnya berdasarkan **“Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa”** : Kepala Kampong **berkedudukan** sebagai kepala pemerintah di Kampong yang berada langsung di bawah Bupati/Walikota dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Kepala Kampong mempunyai **fungsi** memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kepala Kampong mempunyai **tugas** menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan masyarakat serta tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada Kampong.

Kepala Desa mempunyai Wewenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPK.
- 2) Mengajukan rancangan Peraturan Kampong.
- 3) Menetapkan Peraturan Kampong yang telah mendapat persetujuan bersama BPK.
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Kampong mengenai APB Kampong untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPK.
- 5) Membina kehidupan masyarakat Kampong.
- 6) Membina perekonomian Kampong.
- 7) Mengkoordinasikan pembangunan Kampong secara partisipatif.

- 8) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa mempunyai Kewajiban:

- 1) Memeegang teguh dan mengasmalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Memelihara ketentraman dan keterlibatan masyarakat.
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- 5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- 7) Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan.
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Kampong yang baik.
- 9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Kampong.
- 10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Kampong.
- 11) Mendamaikan perselisihan masyarakat di Kampong.
- 12) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Kampong.
- 13) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.

14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Kampong.

15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

Selain kewajiban dimaksud, Kepala Kampong mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampong kepada Bupati/Walikota, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPK, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampong kepada masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampong disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPK disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPK. Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat dan kepada BPK.

b. TUPOKSI Sekretaris Kampong

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kampong

1) Tugas Sekretaris Kampong:

- a) Membantu Kepala Kampong di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Kampong dan masyarakat;
- b) Mewakili Kepala Kampong dalam hal Kepala Kampong berhalangan;
- c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kampong;

- 2) Fungsi Sekretaris Kampong:
- a) Pengkoordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Kampong;
 - b) Pengumpul bahan dan perumus program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Kampong dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
 - c) Pemantauan dan pengevaluasi terhadap kesekretariatan;
 - d) Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan;
 - e) Pengurusan administrasi keuangan, perlengkapan rumah tangga surat menyurat dan kearsipan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Kampong;
 - f) Penyusun Program Kerja Tahunan Kampong dan pertanggungjawaban Kepala Kampong;
 - g) Penyusun laporan Pemerintah Kampong;
 - h) Penyusun dan Penyampaian Bahan Rancangan Peraturan Desa untuk diajukan kepada BPK;
 - i) Pengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.

c. Tugas Pokok & Fungsi KAUR umum

Tugas pokok & fungsi KAUR umum

Tugas utama kepala urusan bagian umum di desa adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan

kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa serta mempersiapkan agenda rapat dan laporan.

- 1) Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan.
- 2) Pelaksanaan pendataan inventarisasi kekayaan desa
- 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum
- 4) Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- 5) Mengelola administrasi data perangkat desa
- 6) Membuat persiapan bahan-bahan laporan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain dari yang di berikan oleh sekretaris desa.

Selain dari tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Sekdes, tidak jarang pejabat kaur umum juga terkadang mendapat tugas langsung dari Kepala Desa. Yang jelas dia harus benar-benar memahami seluk beluk data dan arsip di pemerintahan desa. Karena jika file penting di desa sampai tidak terdata dengan aman dan rapi, bias-bisa akan berakibat fatal.

d. TUPOKSI KAUR Pemerintahan

Tugas Pokok & Fungsi KAUR Pemerintahan

Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR Pemerintahan).

Kepala Urusan Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur sekretariat, yang bertanggung jawab kepada kepala Kampong melalui sekretaris Kampong

Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas:

- 1) Membantu kepala Kampong di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pemerintahan Kampong.
- 2) Membantu sekretaris Kampong di bidang teknis dan administratif pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 3) Mengajukan pertimbangan kepada Kepala Kampong baik menyangkut rancangan Peraturan Kampong maupun hal-hal yang bertalian dengan pemerintahan Kampong.
- 4) Mengajukan pertimbangan kepada kepala Kampong menyangkut urusan perselisihan masyarakat.
- 5) Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampong setiap tahun

Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksana kegiatan pemerintahan Kampong.
- 2) Pelaksana kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 3) Pelaksana tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan Kepala Kampong.
- 4) Pelaksana kegiatan perencanaan pemerintahan Kampong.

e. Tugas Pokok & Fungsi KAUR Pembangunan

Kepala Urusan Pembangunan

Kepala Urusan Pembangunan berkedudukan sebagai unsur sekretariat, yang bertanggungjawab kepada kepala Kampong melalui sekretaris Kampong.

Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas:

- a) Membantu Kepala Kampong di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat Kampong.

- b) Membantu membina perekonomian Kampong.
- c) Mengajukan pertimbangan kepada kepala Kampong baik menyangkut rancangan peraturan Kampong maupun hal-hal yang bertalian dengan pembangunan Kampong.
- d) Penggalian dan pemanfaatan potensi Kampong.

Kepala Urusan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a) Pelaksana kegiatan bidang pembangunan masyarakat Kampong.
- b) Pelaksana kegiatan dalam rangka membina perekonomian Kampong dan inventarisasi potensi Kampong.
- c) Pelaksana tugas-tugas pembangunan yang dilimpahkan oleh Kepala Kampong.
- d) Pelaksana kegiatan perencanaan pembangunan masyarakat Kampong.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Dalam bab ini yang membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini terfokus pada pelaksanaan MUSRENBANG dalam rangka pembangunan infrastruktur di desa Kuala Baru Sungai Aceh Singkil.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer yang diperoleh di lapangan melalui wawancara secara langsung oleh beberapa narasumber di Kantor Kepala Desa Kuala Baru Sungai Aceh Singkil. Maka selanjutnya juga diperlukan data sekunder dalam membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumber seperti data-data berupa dokumen, arsip dan referensi lainnya yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Kuala Baru Sungai Aceh Singkil. Data-data yang diperoleh tersebut akan dideskripsikan sehingga masalah penelitian tentang Efektivitas Pelaksanaan musrenbang dalam rangka pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa kuala baru sungai aceh singkil dapat terjawab dan dianalisa. Selanjutnya hasil wawancara akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan sifat metode penelitian deskriptif kualitatif.

1. Deskripsi Narasumber

a. Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin akan dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan pada tabel 4.1 berikut akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing katagori.

Tabel 4.1

Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	7	78 %
2	Perempuan	2	22%
	Jumlah	9	100%

Sumber: Data Wawancara 2019

b. Deskripsi Narasumber Menurut Umur

Distribusi narasumber menurut umur dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30-39 tahun, umur 40-49 tahun, dan narasumber dengan umur 50-59 tahun. Pada tabel 4.2 akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori umur sebagai berikut.

Tabel 4.2

Deskripsi Narasumber Menurut Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentasi
1	30-39	2	22%
2	40-49	3	33%
3	50-59	4	45%
	Jumlah	9	100%

Sumber: Data Angket 2019

c. Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh narasumber, maka distribusinya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu S1, D3 dan SMA pada tabel 4.3 dibawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut

Tabel 4.3
Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	S1	2	22%
2	D3	-	78%
3	SMA	7	-
	Jumlah	9	100%

Sumber: Data Wawancara 2019

d. Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan

Setiap orang mempunyai pekerjaan yang berbeda dan tak terkecuali pada pekerjaan narasumber. Maka dari itu, berdasarkan distribusi pekerjaan narasumber maka akan dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu pegawai negeri sipil, karyawan, wirasawata, ibu rumah tangga

Tabel 4.4
Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	PNS	2	22%
2	Karyawan	3	34%
3	Wiraswasta	2	22%
4	Ibu Rumah Tangga	2	22%
	Jumlah	9	100%

Sumber: Data Wawancara 2019

2. Deskripsi Hasil Wawancara

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah hasil yang diharapkan dan upaya hasil yang diperoleh dari dilakukannya pelaksanaan Musrenbang dalam pembangunan infrastruktur di desa kuala baru sungai aceh singkil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suhaimi selaku Kepala Desa Kuala Baru Sungai pada kamis, 31 Januari 2019 pukul 08.00 mengatakan bahwa pelaksanaan Musrenbang di Desa Kuala Baru Sungai diarahkan untuk menjadi wadah bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan hasil proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dapat lebih berpihak kepada mereka, dalam pelaksanaan musrenbang tentunya dilaksanakan dengan berbagai tahapan dan proses mulai dari panggilan gagasan dari tiap-tiap dusun yang menjadi kebutuhan prioritas pembangunan, Musrenbang tentunya dilaksanakan atas dasar tujuan pembangunan meskipun ada satu dua kendala dalam penetapan prioritas dikarenakan tidak ada atau belum ada dalam penggunaan anggaran desa namun upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan dan regulasi terus dilakukan sehingga terciptanya sinkronisasi dari usulan prioritas masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Raflizar Syahputra, S.Pd selaku Sekretaris Desa pada kamis, 31 Januari 2019 pukul 09.00 mengatakan bahwa pelaksanaan Musrenbang di Desa Kuala Baru Sungai diarahkan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap pembangunan yang ada di Desa Kuala Baru Sungai, sehingga hasil perencanaan pembangunan dapat lebih

berpihak kepada mereka, musrenbang tentunya dilaksanakan dengan berbagai tahapan dan proses mulai dari panggilan gagasan dari tiap-tiap dusun yang menjadi kebutuhan prioritas pembangunan, Musrenbang tentunya dilaksanakan atas dasar tujuan pembangunan meskipun ada satu dua kendala dalam penetapan prioritas pembangunan dikarenakan tidak ada atau belum ada dalam penggunaan anggaran desa namun upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan dan regulasi terus dilakukan sehingga terciptanya sinkronisasi dari usulan prioritas masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Qussyairi, S.EI selaku Bendahara Desa pada jum`at, 1 februari 2019 pukul 08.00 mengatakan bahwa Perencanaan program pembangunan desa berbentuk melibatkan masyarakat dalam merencanakan program yang akan dibangun untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Proses perencanaan itu berbentuk musyawarah yang dimulai dari tingkat dusun. Sebelum melakukan musrembang, kepala dusun terlebih dahulu mengumpulkan dan menerima usulan-usulan dari masyarakat yang terhimpun dengan segala manfaat dan tujuan yang ingin dicapai, selanjutnya dusun membawa usulan-usulan tersebut dalam musyawarah pembangunan desa (Musrembangdes). Musyawarah ini diadakan dalam lembaga pemberdayaan masyarakat, kemudian pemerintah desa menimbang dengan segala manfaat dan tujuannya. Dari situlah pemerintah dapat memutuskan program apa yang akan di jalankan dan sesuai dengan anggaran PAD. Apabila PAD banyak dimungkinkan untuk menjalankan program-program yang diusulkan masyarakat. Setelah diketahui

program yang akan dijalankan, maka pemerintah menyusun rencana program pembangunan dengan menentukan program mana yang lebih dahulu di jalankan, penetapan waktu pelaksanaannya dan batas akhir penyelesaiannya.

2. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan adalah memilih dan menghubungkan fakta serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang di inginkan.

Bapak Suhaimi yaitu selaku Kepala Desa Kuala Baru Sungai pada Kamis, 31 Januari 2019 pukul 08.00 bahwa untuk melihat apakah perencanaan partisipatif dalam proses pembangunan terlaksana dengan baik atau tidak, maka pemerintah daerah melaksanakan penyusunan rencana pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dimana pada program ini merupakan suatu proses pelibatan masyarakat yang memberikan usulan, saran, dan pendapat yang berhubungan penyelenggaraan pembangunan pada sector ataupun bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta prioritas pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan tiga indicator yaitu (1) Pengumpulan informasi; (2) Menyalurkan aspirasi masyarakat; serta (3) Diversivitas proses pengambilan keputusan. Sesuai dengan tujuan awal penelitian ini, yaitu hendak mengetahui apakah perencanaan partisipatif dalam proses pembangunan daerah di Desa Kuala Baru Sungai telah terlaksana dengan baik atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Raflizar Syahputra, S.Pd Sekretaris Desa Kuala Baru Sungai pada tanggal 31 Januari 2019 pukul 09.30 bahwa Pembangunan yang ada di desa kuala baru sungai tentunya semua dilaksanakan dengan perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perencanaan itu digali dari usulan tiap-tiap dusun yang yang dibawa ke musrenbang tingkat desa yang disepakati secara bersama-sama antara kepala desa, badai pemusyawaratan desa, LPMK, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, nelayan, petani, pendidik dan masyarakat setempat.

Hasil wawancara dengan Bapak Qussyairi, S.EI selaku Bendahara Desa pada jum`at, 1 Februari 2019 pukul 10.00 bahwa Perencanaan yang dilaksanakan dengan berbagai proses dalam musyawarah di desa untuk pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat desa kuala baru sungai dan perencanaan yang melibatkan berbagai unsur untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bakak Syaiful (51 tahun), selaku tokoh masyarakat pada hari selasa tanggal 01 Februari 2019 bahwa Pelaksanaan musrenbang tahun 2019 di sampaikan kepala desa desa kepada masyarakat yang berada di wilayahnya untuk menyusun panitia penyelenggara serta membuat jadwal mengenai pelaksanaan musrenbang agar masyarakat diberi kesempatan dan peluang yang seluas-luasnya untuk ikut serta dalam pelaksanaan musrenbang.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah baik kabupaten maupun kecamatan telah melaksanakan salah satu hal penting yang semestinya di lakukan oleh

pemerintah dalam mewujudkan demokrasi yaitu memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa.

3. Strategi

Partisipasi masyarakat yang dilaksanakan melalui rembuk dan musyawarah pada dasarnya kegiatan ini untuk menggali kebutuhan masyarakat. Partisipasi atau ikut serta merupakan kunci awal musyawarah yang merupakan budaya patut untuk dilestarikan. Dengan adanya musyawarah atau rembuk diharapkan akan tercapai pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara umum. forum-forum tersebut dikonsepsi agar masyarakat berpartisipasi sejak penentuan keputusan prioritas pembangunan serta musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun atau lima tahun secara partisipatif dapat berkesinambungan berjalan sesuai yang diinginkan oleh masyarakat. Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga maupun para pemangku kepentingan lainnya.

Hasil wawancara dengan Bapak Suhaimi selaku Kepala Desa Kuala Baru Sungai pada Kamis, 31 Januari 2019 pukul 08.30 bahwa salah satu cara untuk membangun partisipasi masyarakat dalam Musrenbang adalah dengan adanya kegiatan sosialisasi antar masyarakat dengan pemerintah setempat dan kalangan masyarakat terbawah sekali pun untuk memberikan informasi kepada warga masyarakat Desa Kuala Baru Sungai. Pada tahap sosialisasi ini masyarakat diharapkan dapat lebih melibatkan sebanyak mungkin yang turut

beraspirasi/berargumen pada saat acara Musrenbang yang dilaksanakan secara bersama guna mencapai tujuan bersama.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam suatu wilayah perlu adanya persatuan dan kesatuan yang baik antara unsur-unsur aparat pemerintah dengan masyarakat dalam melakukan pembaharuan dan pembangunan suatu wilayah ke arah yang lebih baik. Misalnya yang diungkapkan oleh Bapak Abdullah (56 Tahun), tokoh masyarakat yang berasal dari Kepala Desa Kuala Baru Sungai mengatakan bahwa: “Saya ikut rapat dalam Musrembang karena masyarakat bersatu dengan baik dengan pemerintah dan pemerintah mau mendengarkan apa yang ingin kami usulkan dan sampaikan mengenai program pembangunan apa yang kami inginkan ke depannya.

Pelaksanaan Musrembang di Kepala Desa Kuala Baru Sungai, peran dan partisipasi dari kaum perempuan juga sangat diperlukan dalam melaksanakan pembangunan desa dan dapat berpeluang besar mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada. Salah satu narasumber dari kaum perempuan mengatakan yaitu Ibu Rahmatia (40 tahun) seorang ibu rumah tangga dari Kepala Desa Kuala Baru Sungai mengungkapkan bahwa : “Saya ikut tahun lalu rapat karena Kepala Desa orangnya baik dan banyak pembangunan desa lancar dan merata dan saya merasakan hal baik itu”.

Selain ibu Rahmatia seorang narasumber dari tokoh masyarakat dari kalangan perempuan lainnya menambahkan mengenai adanya partisipasi wanita dalam pelaksanaan Musrembang di Kepala Desa Kuala Baru Sungai adalah Ibu A. Asmawati (45 Tahun) yang juga selaku ketua Tim Penggerak PKK Desa Kuala Baru Sungai mengungkapkan: “Beberapa masyarakat

khususnya ibu-ibu banyak yang datang di acara rapat seperti itu karena ada beberapa hal seperti komunikasi pemerintah dan masyarakat sudah baik, kami diberi kesempatan untuk berbicara di forum dan kegiatan ibu-ibu PKK seperti pengajian yang dilakukan ibu-ibu majelis taklim, kegiatan bersih-bersih di desa yang dilakukan mendapat dukungan dari pemerintah”.

Berbagai pendapat berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat (narasumber) Desa Kuala Baru Sungai. Partisipasi masyarakat dalam menghadiri rapat musrenbang dinilai cukup baik oleh pemerintah Desa Kuala Baru Sungai itu sendiri.

Hasil wawancara dengan Bapak Suhaimi selaku Kepala Desa Kuala Baru Sungai pada Kamis, 2 Januari 2019 pukul 08.00 bahwa Alhamdulillah masyarakat Desa Kuala Baru Sungai secara keseluruhan sudah membantu dengan baik dalam kegiatan Musrenbang dan kegiatan-kegiatan lainnya karena masyarakat merasa bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan mereka juga yang rasakan dan saya bersyukur selaku pemerintah setempat, masyarakat sangat membantu dan mendukung dengan baik mengenai program-program yang akan kami lakukan”.

Melihat berbagai pendapat tokoh masyarakat di atas mengenai keterlibatan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di Desa Kuala Baru Sungai, adapun pernyataan berbeda yang diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat, yakni Bapak H. Jufri (50 Tahun) pada tanggal 02 Februari 2019 pada pukul 12.00 wib mengenai partisipasi masyarakat dalam menghadiri pelaksanaan musrenbang desa yang dilaksanakan di Desa Kuala Baru Sungai proses dalam musrenbang mengungkapkan demikian: Mengenai

masalah pelaksanaan musrenbang di tingkat desa, banyak masyarakat yang tidak bisa berpartisipasi dengan baik dalam forum rapat untuk memberikan usulan atau masukan mengenai program apa yang akan dilaksanakan nantinya, hal ini dipengaruhi karena banyak masyarakat yang tidak mendapat undangan rapat secara resmi dari pemerintah dan komunikasi yang terjalin masih perlu ditingkatkan karena sampai saat ini kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah belum optimal.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Asse Bandu (45 tahun) pada tanggal 02 Februari 2019 pada pukul 12.30 seorang petani juga selaku Ketua Kelompok Tani di di Desa Kuala Baru Sungai mengenai masih masalah yang ada dalam pelaksanaan musrenbang: Pada dasarnya Musrenbang di Desa Kuala Baru Sungai memang hampir setiap tahun dilaksanakan namun banyak permasalahan yang terjadi seperti banyak usulan masyarakat yang belum diterima karena alasan keterbatasan dana dari pemerintah dan banyak program-program pembangunan desa sampai sekarang belum terlaksana”.

Dari berbagai pernyataan narasumber di atas, kita dapat melihat bahwa di Desa Kuala Baru Sungai memang selalu dilakukan pelaksanaan rapat musrenbang yang dimana beberapa masyarakat ikut hadir dan berpartisipasi dalam memberikan usulan dan pendapatnya mengenai program-program apa yang akan dilakukan dalam membangun desa. Namun dalam pelaksanaan musrenbang di Desa Kuala Baru Sungai, partisipasi masyarakat belum optimal dan belum menyeluruh serta masih perlu ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dan terlibat langsung dalam

proses pembuatan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di setiap tahunnya.

4. Pengawasan

Berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan, menurut Bapak Raflizar Syahputra, S.Pd selaku Sekretaris Desa pada Kamis, 02 Februari 2019 pukul 09.00 mengatakan bahwa: "Pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap program-program desa yang dilaksanakan, ini adalah bentuk upaya pemerintah untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan. Melalui pengawasan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan saran kepada pemerintah untuk kesuksesan jalannya pembangunan."

Berbagai macam program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan desa setiap tahunnya membuat pemerintah dan masyarakat harus berkontribusi lebih dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini berkaitan dengan apa yang diungkapkan salah satu narasumber dari aparat pemerintah Desa Kuala Baru Sungai, oleh Bapak Qussyairi, S.EI selaku Bendahara Desa pada Jumat, 1 Februari 2019 pukul 10.00 mengatakan bahwa: Masyarakat diminta untuk mengawasi seluruh proses pembangunan agar masyarakat merasa diperlukan bahwa program tersebut memang dari masyarakat dan kembali kepada mereka sebagai pemanfaat hasil pembangunan. Pengawasan yang dilakukan dalam bentuk pantauan masyarakat terhadap jalannya pembangunan, apakah program yang diusulkan oleh masyarakat dilaksanakan atau tidak dan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan, salah satu fungsi atau peran yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai bentuk pentingnya perannya masyarakat dalam pembangunan yaitu ikut bersama-sama mengawasi pelaksanaan program-program yang dilakukan pemerintah di desa. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi adanya pembangunan yang tidak terlaksana ataupun terdapat praktekpolitik politik yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan masyarakat.

B. Pembahasan

1. Pencapaian Tujuan

Pelaksanaan Musrenbang di Desa Kuala Baru Sungai diarahkan untuk menjadi wadah bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan hasil proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dapat lebih berpihak kepada mereka, dalam pelaksanaan musrenbang tentunya dilaksanakan dengan berbagai tahapan dan proses mulai dari panggilan gagasan dari tiap-tiap dusun yang menjadi kebutuhan prioritas pembangunan, Musrenbang tentunya dilaksanakan atas dasar tujuan pembangunan meskipun ada satu dua kendala dalam penetapan prioritas dikarenakan tidak ada atau belum ada dalam penggunaan anggaran desa namun upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan dan regulasi terus dilakukan sehingga terciptanya sinkronisasi dari usulan prioritas masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pelaksanaan Musrenbang di Desa Kuala Baru Sungai diarahkan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap pembangunan yang ada di Desa

Kuala Baru Sungai, sehingga hasil perencanaan pembangunan dapat lebih berpihak kepada mereka, musrenbang tentunya dilaksanakan dengan berbagai tahapan dan proses mulai dari panggalian gagasan dari tiap-tiap dusun yang menjadi kebutuhan prioritas pembangunan, Musrenbang tentunya dilaksanakan atas dasar tujuan pembangunan meskipun ada satu dua kendala dalam penetapan prioritas pembangunan dikarenakan tidak ada atau belum ada dalam penggunaan anggaran desa namun upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan dan regulasi terus dilakukan sehingga terciptanya sinkronisasi dari usulan prioritas masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Perencanaan program pembangunan desa berbentuk melibatkan masyarakat dalam merencanakan program yang akan dibangun untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Proses perencanaan itu berbentuk musyawarah yang dimulai dari tingkat dusun. Sebelum melakukan musrembang, kepala dusun terlebih dahulu mengumpulkan dan menerima usulan-usulan dari masyarakat yang terhimpun dengan segala manfaat dan tujuan yang ingin dicapai, selanjutnya dusun membawa usulan-usulan tersebut dalam musyawarah pembangunan desa (Musrembangdes). Musyawarah ini diadakan dalam lembaga pemberdayaan masyarakat, kemudian pemerintah desa menimbang dengan segala manfaat dan tujuannya. Dari situlah pemerintah dapat memutuskan program apa yang akan di jalankan dan sesuai dengan anggaran PAD. Apabila PAD banyak dimungkinkan untuk menjalankan program-program yang diusulkan masyarakat. Setelah diketahui program yang akan dijalankan, maka pemerintah menyusun rencana program pembangunan dengan menentukan program mana yang lebih

dahulu di jalankan, penetapan waktu pelaksanaannya dan batas akhir penyelesaiannya

2. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan adalah memilih dan menghubungkan fakta serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang di inginkan.

Untuk melihat apakah perencanaan partisipatif dalam proses pembangunan terlaksana dengan baik atau tidak, maka pemerintah daerah melaksanakan penyusunan rencana pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dimana pada program ini merupakan suatu proses pelibatan masyarakat yang memberikan usulan, saran, dan pendapat yang berhubungan penyelenggaraan pembangunan pada sector ataupun bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta prioritas pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan tiga indicator yaitu (1) Pengumpulan informasi; (2) Menyalurkan aspirasi masyarakat; serta (3) Diversivitas proses pengambilan keputusan. Sesuai dengan tujuan awal penelitian ini, yaitu hendak mengetahui apakah perencanaan partisipatif dalam proses pembangunan daerah di Desa Kuala Baru Sungai telah terlaksana dengan baik atau tidak.

Pembangunan yang ada di desa kuala baru sungai tentunya semua dilaksanakan dengan perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perencanaan itu digali dari usulan tiap-tiap dusun yang yang dibawa ke musrenbang tingkat desa yang disepakati secara bersama-sama antara kepala desa, badai

pemusyawaratan desa, LPMK, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, nelayan, petani, pendidik dan masyarakat setempat.

Perencanaan yang dilaksanakan dengan berbagai proses dalam musyawarah di desa untuk pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat desa kuala baru sungai dan perencanaan yang melibatkan berbagai unsur untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Pelaksanaan musrenbang tahun 2019 di sampaikan kepada masyarakat setelah Saudara camat memberitahukan kepada lurah yang berada di wilayahnya untuk menyusun panitia penyelenggara serta membuat jadwal mengenai pelaksanaan musrenbang agar masyarakat diberi kesempatan dan peluang yang seluas-luasnya untuk ikut serta dalam pelaksanaan musrenbang.

Pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah baik kabupaten maupun kecamatan telah melaksanakan salah satu hal penting yang semestinya di lakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan demokrasi yaitu memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa.

3. Strategi

Salah satu cara untuk membangun partisipasi masyarakat dalam Musrenbang adalah dengan adanya kegiatan sosialisasi antar masyarakat dengan pemerintah setempat dan kalangan masyarakat terbawah sekali pun untuk memberikan informasi kepada warga masyarakat Desa Kuala Baru Sungai. Pada tahap sosialisasi ini masyarakat diharapkan dapat lebih melibatkan sebanyak mungkin yang turut beraspirasi/berargumen pada saat acara Musrenbang yang dilaksanakan secara bersama guna mencapai tujuan bersama.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam suatu wilayah perlu adanya persatuan dan kesatuan yang baik antara unsur-unsur aparat pemerintah dengan masyarakat dalam melakukan pembaharuan dan pembangunan suatu wilayah ke arah yang lebih baik. Masyarakat ikut rapat dalam Musrembang karena masyarakat bersatu dengan baik dengan pemerintah dan pemerintah mau mendengarkan apa yang ingin kami usulkan dan sampaikan mengenai program pembangunan apa yang kami inginkan ke depannya.

Beberapa masyarakat khususnya ibu-ibu banyak yang datang di acara rapat seperti itu karena ada beberapa hal seperti komunikasi pemerintah dan masyarakat sudah baik, kami diberi kesempatan untuk berbicara di forum dan kegiatan ibu-ibu PKK seperti pengajian yang dilakukan ibu-ibu majelis taklim, kegiatan bersih-bersih di desa yang dilakukan mendapat dukungan dari pemerintah”.

Masyarakat Desa Kuala Baru Sungai secara keseluruhan sudah membantu dengan baik dalam kegiatan Musrembang dan kegiatan-kegiatan lainnya karena masyarakat merasa bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan mereka juga yang rasakan dan saya bersyukur selaku pemerintah setempat, masyarakat sangat membantu dan mendukung dengan baik mengenai program-program yang akan kami lakukan”.

Partisipasi masyarakat dalam menghadiri pelaksanaan musrembang desa yang dilaksanakan di Desa Kuala Baru Sungai proses dalam musrembang mengungkapkan demikian: Mengenai masalah pelaksanaan musrembang di tingkat desa, banyak masyarakat yang tidak bisa berpartisipasi dengan baik dalam forum rapat untuk memberikan usulan atau masukan mengenai program apa yang

akan dilaksanakan nantinya, hal ini dipengaruhi karena banyak masyarakat yang tidak mendapat undangan rapat secara resmi dari pemerintah dan komunikasi yang terjalin masih perlu ditingkatkan karena sampai saat ini kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah belum optimal.

Desa Kuala Baru Sungai mengenai masih masalah yang ada dalam pelaksanaan musrembang: Pada dasarnya Musrembang di Desa Kuala Baru Sungai memang hampir setiap tahun dilaksanakan namun banyak permasalahan yang terjadi seperti banyak usulan masyarakat yang belum diterima karena alasan keterbatasan dana dari pemerintah dan banyak program-program pembangunan desa sampai sekarang belum terlaksana.

Desa Kuala Baru Sungai memang selalu dilakukan pelaksanaan rapat musrembang yang dimana beberapa masyarakat ikut hadir dan berpartisipasi dalam memberikan usulan dan pendapatnya mengenai program-program apa yang akan dilakukan dalam membangun desa. Namun dalam pelaksanaan musrembang di Desa Kuala Baru Sungai, partisipasi masyarakat belum optimal dan belum menyeluruh serta masih perlu ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dan terlibat langsung dalam proses pembuatan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di setiap tahunnya.

4. Pengawasan

Pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap program-program desa yang dilaksanakan, ini adalah bentuk upaya pemerintah untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan. Melalui pengawasan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan saran kepada pemerintah untuk kesuksesan jalannya pembangunan.

Berbagai macam program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan desa setiap tahunnya membuat pemerintah dan masyarakat harus berkontribusi lebih dalam pelaksanaan pembangunan. Masyarakat diminta untuk mengawasi seluruh proses pembangunan agar masyarakat merasa diperlukan bahwa program tersebut memang dari masyarakat dan kembali kepada mereka sebagai pemanfaat hasil pembangunan. Pengawasan yang dilakukan dalam bentuk pantauan masyarakat terhadap jalannya pembangunan, apakah program yang diusulkan oleh masyarakat dilaksanakan atau tidak dan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan, salah satu fungsi atau peran yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai bentuk pentingnya perannya masyarakat dalam pembangunan yaitu ikut bersama-sama mengawasi pelaksanaan program-program yang dilakukan pemerintah di desa. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi adanya pembangunan yang tidak terlaksana ataupun terdapat praktek-praktek politik yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan masyarakat.

5. Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Baru Sungai Aceh Singkil

Pemerintah Desa Kuala Baru Sungai berupaya menggerakkan partisipasi masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan yang sudah dikenal di tengah masyarakat. Lembaga tersebut adalah RT, RW dan sampai ketingkat dusun. Keterlibatan masyarakat ini berbentuk usulan program dan pelaksanaan program. Usulan program yaitu dimulai dari RT dan RW, masyarakat sudah mulai merencanakan program pembangunan yang dibutuhkan. Kemudian

dimusyawarahkan ditingkat Dusun untuk mengetahui program tersebut bagus atau tidak, apakah layak untuk diusulkan dan melihatnya dari segi manfaat.

Keterlibatan masyarakat melalui lembaga ini dalam bentuk mengusulkan ide-ide pembangunan dan melaksanakan kerja bakti bersama. Dalam menyampaikan ide-ide dan usulan, pemerintah menyediakan tempat bagi masyarakat untuk menyalurkannya melalui ketua kelompok tetangga mereka kemudian ditindak lanjuti sampai kepada kepala desa.

Dengan adanya lembaga ini, diharapkan masyarakat merasa terbantu dengan cepat memberikan informasi kepada ketua RT tentang keinginan mereka dalam menyampaikan aspirasi.

Pemerintah Desa Kuala Baru Sungai terus berupaya menggerakkan partisipasi masyarakat untuk kemajuan pembangunan, yaitu melalui kegiatan gotong royong yang dilaksanakan baik tingkat dusun maupun di tingkat desa.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat selaku aparat pemerintah desa, pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk saling bekerja sama dan bergotong royong dalam segala hal yang dilakukan seperti pembangunan jalan tani di desa, pembangunan balai pertemuan desa dan pembangunan infrastruktur desa lainnya.

Dalam melaksanakan kegiatan gotong royong dilaksanakan di desa, pemerintah harus melibatkan dan menggerakkan partisipasi penuh dari kalangan pemuda dan perempuan juga supaya kegiatan pembangunan juga dirasakan dan berdampak baik bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dengan adanya upaya pemerintah menggerakkan partisipasi masyarakat, diharapkan termotivasi untuk mengeluarkan ide, gagasan dan usulan, serta dapat mendorong semangat gotong royong masyarakat, bukan berbentuk tenaga saja tetapi melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan. Namun dalam upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kuala Baru Sungai tersebut, masih terdapat kekurangan disana sini, partisipasi masyarakat tidak maksimal, bukan dalam materi saja tetapi secara non fisik juga tidak ikut terlibat, masyarakat tidak terlibat secara keseluruhan, hanya beberapa masyarakat yang datang dan ikut untuk menjalankan pembangunan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kuala Baru Sungai mengenai skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Baru Sungai Aceh Singkil”, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan yang berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat di Desa Kuala Baru Sungai dalam mengikuti pelaksanaan rapat Musrembang di Desa Kuala Baru Sungai masih kurang aktif dan masih perlu ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dan terlibat langsung dalam proses pembuatan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan disetiap tahunnya.

Hal yang menjadi kendala sehingga masih banyak masyarakat yang kurang aktif dalam mengikuti pelaksanaan musrembang adalah kurang dilibatkannya masyarakat secara aktif dalam proses pembuatan maupun pelaksanaan program-program pembangunan di desa sehingga menyebabkan kurang terjalin hubungan kerja sama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah setempat dalam melaksanakan pembangunan di desa. Selain itu, hal mendasar lainnya mengenai permasalahan komunikasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat dengan banyaknya masyarakat yang tidak tahu tentang adanya pelaksanaan musrembang karena tidak mendapat undangan

maupun panggilan dari panitia penyelenggara musrembang yakni pemerintah desa.

Hal lain yang mejadi permasalahan adalah kurang terlibatnya seluruh lapisan aspek masyarakat dengan pemerintah Desa Kuala Baru Sungai dalam merumuskan suatu program pembangunan desa dalam musrembang

2. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan Musrembang ke depannya adalah dengan cara:
 - a. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan program pembangunan.
 - b. Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan,
 - c. Menggerakkan partisipasi melalui lembaga yang dikenal oleh masyarakat.
 - d. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan program pembangunan.
 - e. Mengajak masyarakat untuk bergotong royong.

Hal tersebut sangat perlu dilakukan oleh pemerintah Desa Kuala Baru Sungai mengingat akan pentingnya pembangunan yang baik. Hal tersebut dapat terwujud apabila masyarakat dan pemerintah bekerja sama dan memberikan ruang kepada masyarakat seutuhnya terlibat langsung dalam program pembangunan yang dilaksanakan di Desa Kuala Baru Sungai.

B. Saran

Adapun saran dari penulis berkaitan dengan penelitian tersebut adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Masyarakat harus menyadari akan pentingnya berpartisipasi dan menjalin komunikasi serta bekerja sama dengan baik masyarakat lain maupun dengan pemerintah desa setempat dalam merumuskan dan menjalankan program-program pembangunan desa apa yang akan dilaksanakan ke depannya sehingga dapat membangun desa dengan baik dengan tujuan kesejahteraan bersama.
2. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui program-program pembangunan yang pro dengan masyarakat. Namun, pembangunan akan berjalan dengan baik apabila pemerintah melibatkan masyarakat sepenuhnya di desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, Suharsimi. *Prodedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Pt,Lineka Cipta,2010
- Bratakusumah, Deddy Supriady & Riyadi. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Departemen Kimpraswil, 2001, *Pedoman atau petunjuk Teknik dan Manual: Air Minum Perkotaan Bagian: 6 (Volume I)*. Balitbang . Jakarta
- Hadiwijoyo, Surya Sakti. (2012). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Kansil, 1983, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. (Edisi Revisi), Bumi Aksara, Jakarta
- Khairuddin,2005,," *Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek: Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan*", Liberty,Yogyakarta
- Limbong W.H, Sitorus. 2017. *Pengantar Tataniaga Pertanian*. Fakultas Pertanian IPB. Bogor
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama
- Moleong, L. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha Taliziduhu, 1990. *Teori Budaya Organisasi*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Nurdin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Perundang-Undangan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa*.
- Rahmi, Sri. 2015. *Kepemimpinan Transformasional dan Budaya Organisasi Ilustrasi Bidang Pendidikan*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Raihani, Cici. 2015. *Pengertian Efektivitas*. PT,Gramedia: Jakarta
- Santoso, Pandji. 2008 . *Administrasi public Teori aplikasi good governance*. Bandung: Refika Aditama

Siagian, Sondang P. 2001. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.

Sudirwo, Daeng. (1981). *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah Dan Pemerintahan Desa Bandung*: Penerbit Angkasa Bandung. Mandar Maju, Bandung, 1993

Sutrisno, Edy.2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT.Gramedia: Jakarta.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1990. *Perencanaan Pembangunan*. Haji Masagung. Jakarta

Wijaya, HAW, 2013. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: Rawali Pers

Skripsi:

Mustika Rihardini. (2012). Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (PNPM MP SPP) di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara Pada Periode 2010. Makassar: Thesis Universitas Hasanudin